

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan titik tolak pemikiran atau merupakan acuan dalam melakukan penelitian, disamping itu sebagai landasan untuk merumuskan anggapan dasar dalam pengambilan hipotesa dalam penelitian. Maka sesuai peroposal ini berjudul “implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kua kecamatan kunjang” maka dalam sub bab ini akan dibahas:

#### A. Tinjauan Implementasi kebijakan.

##### 1. Pengertian implementasi kebijakan

Kata implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implemen* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah penyedia media untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu efek terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menyebabkan efek itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemeruntahan dalam kehidupan bernegara<sup>12</sup>

Implementasi merupakan suatu perbuatan atau pelaksanaan dari sebuah susunan rencana yang dibuat secara terstruktur dan rinci. Implementasi biasanya dilaksanakan sesudah perencanaan dianggap layak. Menurut Nurudin Usman, implementasi berakhir pada kegiatan, aksi,

---

<sup>12</sup> Muhamad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam perspektif Governance Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2017) hlm.51.

pelaksanaan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi tidak hanya suatu aktivitas, namun suatu kegiatan yang terstruktur dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.<sup>13</sup> Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>14</sup>

Pelaksanaan implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan implementasi adalah suatu cara dalam praktik tentang suatu ide, pemrograman atau suatu aktifitas baru bagi seseorang dalam mencapai atau menginginkan suatu perubahan.<sup>15</sup>

Muhammad Joko Susila mengatakan, bahwa implementasi merupakan peletakan ide konsep, kebijakan, inovasi, atau dalam suatu tindakan materiil sehingga menghasilkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.<sup>16</sup>

Secara sederhana Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang telah tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi bermakna penerapan. Menurut Browne dan

---

<sup>13</sup> Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

<sup>14</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39

<sup>15</sup> Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014) hlm. 6

<sup>16</sup> Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 189-191

Wildavsky mengatakan bahwa “implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling beradaptasi”. Selain itu schubert mengatakan bahwa implementasi merupakan sistim rekayasa.

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa implementasi berakhir pada suatu kegiatan, adanya pelaksanaan, tindakan, atau mekanisme suatu sistim. Kata mekanisme berarti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan yang telah direncanakan serta dilaksanakan dengan benar yang didasarkan kepada norma tertentu untuk mencapai hasil yang di inginkan dari kegiatan tersebut. Dari pemaparan diatas implementasi dapat dimaknai sebagai penerapan atau operasionalisasi aktivitas guna mendapatkan sasaran atau tujuan.<sup>17</sup>

Kebijakan adalah semua perbuatan yang yang di sahkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan untuk mencapai keinginan yang dikehendaki melalui program-program pemerintah.<sup>18</sup>

Syukur dalam Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah<sup>19</sup> mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu perbuatan atau kegiatan untuk mencapai kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan pelaksana lainnya dengan proses administrasi serta manajemen dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Unsur penting dalam pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018) hlm. 19.

<sup>18</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 34.

<sup>19</sup> Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok: CV Citra Utama, 2005), hlm. 79.

implementasi dibagi menjadi tiga, yaitu: terdapat kebijakan atau program untuk dilaksanakan, sasarannya yaitu kelompok masyarakat dan diharapkan menghasilkan perubahan atau peningkatan yang baik dari program yang dilaksanakan, tanggung jawab dari pelaksanaan kelompok maupun perorangan dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Pelaksanaan suatu program memerlukan implementasi yang dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam buku Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Dr.I.Nyoman Sumaryadi mengemukakan bahwa implementasi program pemerintah dapat dipandang dari sudut yang berbeda.<sup>20</sup>

2. Proses implementasi, diantaranya adalah:
  - a. Penerapan dan proses implementasi.
  - b. Pelaksanaan proses implementasi.
  - c. Tindak lanjut proses implementasi.

Langkah penting dalam penerapan sistim baru adalah prencanan dan penerapan. Tujuannya supaya sistim yang baru benar-benar tepat dengan tujuan dan sasarannya.faktor anggaran dan biaya merupakan faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan implementasi. Tahap ini ditujukan untuk mengontrol dana yang dikeluarkan.

Masalah lain yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan implementasi adalah waktu, dikarenakan waktu memiliki peran prnting untuk menentukan jadwal dan penerapan proses sistim.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 80

Kegiatan implementasi memiliki tujuan untuk melaksanakan proses sistem baru. Berikut ini adalah jenis-jenis bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. pelatihan (*training*).
- b. Seleksi tempat dan instalasi hardware dan software.
- c. Pengujian program.
- d. Pengujian sistem.
- e. Konversi sistem.<sup>21</sup>

### 3. Teori Implementasi

Teori kebijakan publik yang dimunculkan oleh para ahli di antaranya adalah:

- a. Edwards III yang terdiri:
  - 1) komunikasi, terkait erat dengan pemahaman atas apa yang akan implementor kerjakan, akan bisa berjalan mana kala menjalin komunikasi dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan pengaturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat akurat dan konsisten.
  - 2) Sumberdaya adalah suatu hal yang penting lainnya untuk menunjang implementasi kebijakan. indikator yang dijadikan untuk tolak ukur sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu : staff, informasi, wewenang dan fasilitas perlu fasilitas yang memadai

---

<sup>21</sup> Kusri dan Andi Koniyo, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akutansi Dengan Visual Basic dan Microsof Server*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm. 279

baik kualitas maupun kuantitas untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

- 3) Diposisi terkait dengan sikap merupakan faktor penting ke tiga dari pelaksanaan kebijakan untuk penekanan dalam implementasi kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.
  - 4) Tata n birokrasi. Mekanisme dan struktur birokrasi merupakan pelengkap dari struktur organisasi, setiap *implementor* akan bertindak sesuai dengan pedoman atau SOP (*standart operation procedure*) supaya tidak melebar dari keinginan yang akan dicapai. Unsur ke dua yaitu tata n birokrasi yang berlebihan dan ter fragmentasi yang berakibat lemahnya pengawasan serta rumitnya prosedur birokrasi dan berakibat pada kegiatan organisasi yang tidak elastis.<sup>22</sup>
- b. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menjabarkan implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana-rencana sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 11 usaha-usaha untuk merubah rencana-rencana menjadi pelaksanaan dalam waktu yang telah ditentukan maupun untuk meneruskan usaha-usaha demi mendapatkan perubahan yang telah ditetapkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali., *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam perspektif Governance Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 219-220

sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- c. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: implementasi merupakan mempelajari sesuatu apa yang benar-benar terjadi setelah ditetapkannya program oleh pemerintah yang mencakup semuanya baik kegiatan maupun dampak yang diterima langsung oleh masyarakat.
- d. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 1). Teori George C. Edward Edward II (1980: 17-53-89-125) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  - 1) Komunikasi, yaitu implementor harus mengetahui apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan di dalam masyarakat, yang mana tujuan tersebut harus disampaikan kepada target untuk membangun efektifitas implementas.
  - 2) Sumber daya, sumber daya berperan sangat penting dikarenakan apabila sumber day tersebut kurang maka implementor akan kesulitan untuk mencapai tujuan implementasi. sumber daya yang dimaksudkan dapat berupa sumber daya manusia, contohnya persaingan implementor dan sumber daya keuangan.

- 3) Disposisi, adalah keadaan psikologis dari implementor, yang mana disposisi ini akan menentukan jalannya implementasi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, apabila implementor memiliki disposisi yang baik tentunya implementasi akan berjalan seperti apa yang diharapkan, namun sebaliknya apabila implementor memiliki disposisi yang kurang baik bahkan tidak baik pasti implementasi akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 4) Tatanan birokrasi, pengaruh yang penting juga datang dari tatanan birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu banyak akan menyebabkan lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan dan berakibat pada kegiatan organisasi yang tidak elastis, Edwards (1980: 125) memaparkan bahwa sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelayanan.
- 5) Edward (1980: 125) memaparkan bahwa terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja yang mana didasarkan pada kekompakan, semangat, dan keinginan yang sama untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi demi terwujudnya suatu tujuan yang telah ditentukan, Adapun

fragmentasi merupakan desakan-desakan yang di terima dari luar birokrasi seperti badan legislati, kelompok lain yang berkepentingan dan konstitusi negara.

## **B. Tinjauan Bimbingan Pranikah**

### **1. Pengertian bimbingan pra-nikah**

Bimbingan jika diartikan dengan bahasa Inggris yaitu guidance dan memiliki kata dasar guide, guidance memiliki beberapa makna diantaranya, bimbingan, mengatur, menunjukkan jalan, nenberi petunjuk, mengarahkan dan memberi nasihat. Secara etimologi bimbingan diartikan sebagai tuntunan, bantuan dan pertolongan.<sup>23</sup>

Bimbingan pra-nikah merupakan kegiatan yang diadakan untuk calon pengantin yang akan melaksan pernikahannya. Calon pengantin tersebut datang kepada konselor untuk diberikan nasihat tentang kehidupan berumah tangga untuk meyakinkan dan beradaptasi di kehidupan barunya kelak, yaitu kehidupan berumah tangga.<sup>24</sup>

Surya menambahkan bahwa bimbingan adalah memberi pemahaman kepada klien secara berkelanjutan dan sistematis untuk menumbuhkan kemandirian dalam memahami diri, penerimaan diri, pengarahan diri serta

---

<sup>23</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, cetPertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.

<sup>24</sup> Valentina Rosa Manihuk, *Persepsi Tentang Konseling Pra Nikah Pada Mahasiswa Tingkat Akhir*,

perwujudan diri demi mencapai perkembangan yang baik dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.<sup>25</sup>

Konseling pra-nikah merupakan pemberian materi serta nasihat-nasihat kepada kedua mempelai yang berhubungan tentang psikologis, seksual medis serta sosial.<sup>26</sup>Jadi, konseling pra-nikah dapat dikatakan pemberian pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan bermah tangga dan menganalisa kemungkinan masalahsera rintangan yang mungkin akan mereka hadapi kelak saat menjalani kehidupan berumah tangga dan memberi pemahaman tentang cara memecahkan masalah.<sup>27</sup>

Pra-nikah adalah masa sebelum dilaksanakannya akad nikah dari kedua mempelai, yang bertujuan untuk mendapatkan status suami istri secara resmi menurut undang undang yang berlaku serta agama. Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan konseling pra-nikah adalah pemberian pemahaman tentang kehidupan berumah tangga kepada calon mempelai, sebelum menjalani akad nikah dan kehidupan berumah tangga agar dijadikan tuntunan serta landasan dalam mencapai kebahagiaan berumah tangga didunia maupun di akhirat kelak.<sup>28</sup>

Pra memiliki arti sebelum atau dimuka, sedangkan nikah merupakan perjanjian (akad) antara kedua mempelai yang akan menjadikan hukum bersetubuh dari semula haram menjadi halal. Jadi bimbingan pra-nikah adalah

---

<sup>25</sup> Moh. Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bhakti Winaya, 1994), hlm. 22.

<sup>26</sup> <http://kamuskesehatan.com/arti/konseling-pranikah/>

<sup>27</sup> Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 25.

<sup>28</sup> Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 69.

pembekalan materi terhadap calon mempelai pengantin agar dijadikan sebagai pegangan hidup serta dapat menjalani berumah tangga secara baik dan benar, tenang dan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga yang kemungkinan akan terjadi pada kehidupan berumah tangganya kelak.<sup>29</sup>

Bimbingan pra-nikah bertujuan untuk membimbing calon mempelai pengantin dalam mencegah timbulnya masalah-masalah serius dalam kehidupan berumah tangga, diantaranya adalah:

- a. Membantu calon mempelai tentang arti dari pernikahan.
- b. Membantu calon mempelai agar faham dengan kehidupan berumah tangga.
- c. Membantu calon mempelai agar faham dengan persyaratan pernikahan.
- d. Membantu calon mempelai untuk membangun kesiapan dalam kehidupan berumah tangga.
- e. Membantu calon mempelai untuk tunduk dan menjalankan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta syariat agama.<sup>30</sup>

## 2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah

pelaksanaan bimbingan pra-nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, yaitu dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis

---

<sup>29</sup>Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy Bimbingan dan Konseling Agamateori dan kasus*,(jakarta: bina rena pariwisata, 2000), hlm. 197.

<sup>30</sup> Ainur Rahim, Fakih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yohyakarta: UII Press, 2001) hlm. 84.

dilingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah.

Kursus yang dimaksud ialah dalam bentuk pembekalan singkat yang akan disampaikan kepada calon pengantin serta remaja yang memiliki usia siap nikah dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 24 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam 3 hari atau diatur secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara konselor dengan peserta bimbingan .

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah dibeberapa negara ASIA diantaranya MALAYSIA dan SINGAPURA dilaksanakan oleh lembaga negara atau badan negara yang di dukung dan diberikan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) ialah contoh dari negara yang menjalankan bimbingan pra-nikah dengan tata cara waktu pelaksanaannya yaitu selama 1 sampai 3 bulan dengan jumlah 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) mengatur pelaksanaan waktu kursus bimbingan pra-nikah yaitu 3 bulan dengan jumlah 8 sampai 10 kali pertemuan. Untuk waktu pelaksanaan diatur secara fleksibel, biasanya dilaksanakan pada waktu libur bekerja yang dimiliki calon mempelai.

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagaimana yang sudah tertera di dalam pedoman ini pelaksanaannya berbeda dengan bimbingan pra-nikah yng

telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, bimbingan pra-nikah sejatinya diadakan oleh lembaga seperti KUA atau BP4 dengan memanfaatkan waktu 10 hari sesudah mendaftarkan diri ke KUA atau BP4 setempat, sedangkan dalam praktiknya bimbingan pra-nikah dilaksanakan dengan waktu yang fleksibel, hal tersebut memberi peluang kepada seluruh masyarakat terutama remaja usia menikah dan calon mempelai untuk turut andil sebagai peserta di dalam bimbingan pra-nikah.<sup>31</sup>

Untuk menunjang pelaksanaan bimbingan pra nikah maka, penyelenggara bimbingan pra-nikah diwajibkan memiliki fasilitas serta sarana yang memadai dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terdapat beberapa fasilitas yang sangat mendukung diantaranya adalah:

a. Bentuk Fisik

- 1) Ruang kantor.
- 2) Ruang penasihat.
- 3) Peralatan mobilitas.
- 4) Peralatan tampilan (optik).
- 5) Peralatan elektronika seperti komputer, sound system, proyektor dan lain-lain.
- 6) Tempat penyimpanan arsip.

---

<sup>31</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

b. Bentuk Nonfisik:

- 1) Petunjuk pelaksanaan penasihatan (juklak).
- 2) organisasi.
- 3) Buku serta formulir kesehatan.
- 4) Perpustakaan.<sup>32</sup>

3. Metode Bimbingan Pra-nikah

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti suatu tata cara atau penempuhan jalan untuk mewujudkan suatu tujuan secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif ialah antara dana, waktu serta tenaga dapat berlaku selaras, sementara maksud dari efisien ialah suatu hal yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan atau hasil.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, metode ialah mekanisme yang runtut untuk mempermudah suatu kegiatan untuk mencapai suatu hasil.<sup>34</sup>

Ditinjau dari beberapa pembahasan di atas, sudah jelas bahwa metode merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan atau hasil, maka diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Penciptaan tujuan yang jelas merupakan langkah paling penting pembimbing dalam merumuskan serta memilah metode bimbingan yang benar. Dalam pelaksanaan bimbingan pra-

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm.79.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>34</sup> Shabri Shaleh Anwar dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-Qur'an KH. Bustani Qadri*, (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020) hlm.116

nikah tentu sudah jelas bahwa metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi serta study kasus menyesuaikan kondisi di lapangan.

a. Metode Langsung

Metode ini menggunakan alat komunikasi secara langsung yang mana konselor dengan klien melaksanakan komunikasi tatap muka, metode ini dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Metode Individual.

- a) Percakapan pribadi, artinya konselor berkomunikasi secara langsung atau tatap muka.
- b) Berkunjung ke tempat tinggal klien, artinya konselor mendatangi tempat tinggal klien untuk mengadakan dialog.
- c) Kunjungan dan dan melaksanakan observasi kerja, artinya konselor mengamati kerja serta lingkungan klien sekaligus melaksanakan komunikasi secara langsung.

2. Metode Kelompok.

- a) Diskusi dalam bentuk kelompok, artinya konselor membentuk suatu kelompok untuk mendiskusikan suatu masalah yang sama dari anggota kelompok tersebut.

- b) Karyawisata, artinya konselor mengadakan suatu wisata yang digunakan sebagai forum untuk melaksanakan kegiatan bimbingan.
- c) Sosiodrama Dn Psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
- d) *Group Teaching*, artinya bimbingan yang dilakukan secara langsung dihadapan peserta dalam bentuk kelompok yang telah dibentuk.

### 3. Metode tidak langsung.

- a) Metode individual, metode ini merupakan teknik bimbingan menggunakan media seperti telephone, surat dan lainnya.
- b) Metode kelompok, metode ini merupakan teknik bimbingan yang memanfaatkan media masa seperti web, media sosial, surat kabar dan televisi.<sup>35</sup> .

### 4. Tujuan Bimbingan Pra-nikah

Di dalam agama islam membentuk sebuah keluarga sangatlah dianjurkan dan menyuruh dari setiap individu untuk bernaung diwahnya, didalam membangun sebuah keluarga tentunya sangat perlu untuk melakukan persiapan yang sungguh-sungguh baik berupa fisik, finansial,

---

<sup>35</sup> Ainur Rahim Faqih, *bimbingan dan konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), hlm. 53-55

sosial serta bimbingan pra-nikah yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, dan agar keluarga yang dibentuk akan sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam isi Al-Qur'an yaitu keluarga yang diliputi kesenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tentunya untuk membangun keluarga seperti yang telah disebutkan, perlu melaksanakan bimbingan pra-nikah.<sup>36</sup>

Menurut Tohari Musnawartujuan bimbingan pra-nikah ialah memberikan suatu jalan, tujuan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, dikarenakan jika tidak ada tujuan yang jelas, maka kegiatan yang dilakukan tidak memiliki arti apa-apa. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk:

- a. Membantu calon pengantin dalam memahami makna pernikahan.

Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:

- 1) Hakekat perkawinan menurut islam.
- 2) Tujuan perkawinan menurut islam.
- 3) Syarat-syarat perkawinan menurut islam.
- 4) Persiapan diri untuk menjalin pernikahan.

- b. Membantu calon pengantin dalam mencegah dan menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga.

---

<sup>36</sup>Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Ponorogo: Myra Publisher, 2019), hlm 25

Dalam hal ini membantu dalam memahami:

- 1) Hakekat rumah tangga menurut islam.
- 2) Tujuan rumah tangga menurut islam.
- 3) Tatacara membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa inti dan tujuan dari bimbingan pra-nikah ialah membantu calon pengantin untuk mencegah ataupun menghadapi masalah-masalah pernikahan serta masalah-masalah dari rumah tangga menurut syariat islam.<sup>37</sup>

Untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, pasangan suami istri wajib membekali dirinya dengan bimbingan pra-nikah serta kesiapan diri baik fisik maupun mental. Hal tersebut dikarenakan karena rumah tangga masalah yang sangat beragam, mulai dari masalah kecil hingga masalah yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga sehingga membutuhkan tanggung jawab yang serius. Secara umum terbentuknya keluarga yang *sakina, mawaddah, rahmah* dapat diindikasikan seperti berikut ini:

Di dalam hubungan rumah tangga islami seorang suami mempunyai kewajiban yang terhadap istri dan keluarganya, begitu pula dengan seorang istri yang juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suaminya. Jika hak serta kewajiban dipenuhi secara ikhlas dan tulus maka

---

<sup>37</sup> Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*,(Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7

hubungan rumah tangga tidak akan terjadi konflik yang serius.<sup>38</sup>

Di dalam islam hak dan kewajiban rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh pasangan suami isteri dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>39</sup>:

a. Hak dari isteri (kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadapistri) diantaranya yaitu:

1) Mas kawin atau mahar

Mas kawin atau mahar adalah sesuatu yang harus (wajib) diberikan kepada istri sebagai pertanda ikatan janji sehidup semati yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa“ ayat 4 berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”*

Ukuran dari pemberian mas kawin atau mahar didasarkan pada kesepakatan antara mempelai pria dengan mempelai wanita dikarenakan mas kawin atau mahar harus didasarkan pada keikhlasan. Dari mahar atau maskawin tersebut diharapkan dapat membangun pondasi yang kokoh dalam ikatan suami isteri.

---

<sup>38</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 28.

<sup>39</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 86.

## 2) Nafkah

Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan dari istri dan keluarganya (nafkah). Untuk istri, suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bukan hanya dari segi finansial (*lahiriyah*), namun juga diwajibkan memberi nafkah kerohanian (*batiniyah*).

Dalam segi kebutuhan finansial, suami diwajibkan mencukupi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki seorang suami, dalam artian seorang suami dituntut untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak wajar, yaitu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Untuk ukuran tingkat kewajaran dalam hal mencukupi kebutuhan tentunya setiap keluarga berbeda-beda. Selain finansial suami juga dituntut untuk mencukupi kebutuhan kerohanian (*batiniyah*) kepada sang isteri, dalam artian seorang suami harus mencukupi kebutuhan biologis dari sang istri dengan cara yang baik dan tidak meninggalkan norma-norma kesopanan. Sehingga kelak diharapkan melahirkan seorang anak yang sahliyah atau shalihah.

Seorang suami yang baik dituntut untuk bisa selalu melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Dan seorang

suami yang baik tentunya akan selalu membahagiakan keluarganya dengan sekuat tenaga dan fikirannya. bahkan seorang suami yang baik diharuskan memprioritaskan kebutuhan keluarganya diabadikan kebutuhan-kebutuhan lain .<sup>40</sup>

- b. Hak dari suami (kewajiban tang wajib dipenuhi oleh seorang isteri terhadap suami).

Seorang isteri wajib wajib memberikan hak kepada suami seperti diwajibkan untuk menghormatinya, mentaati, memberikan pelayanan sepenuh hati kepada sang suami dan diwajibkan untuk menjaga diri serta harta dari suami yang telah duberikan.<sup>41</sup>

- c. Hak bersama (kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduabelah pihak).

Kewajiban bersama yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami maupun isteri, yang mana hak tersebut berupa tanggung jawab yang dibebankan dengan kewajiban yang diperoleh dalam rumah tangga.<sup>42</sup> .....

---

<sup>40</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 85.

<sup>41</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 91.

<sup>42</sup>Ibid. hlm. 92.

### C. Tinjauan tentang efektifitas.

#### 1. Pengertian tentang efektifitas

Efektifitas berasal dari suku kata “efektif” yang mengandung makna tercapainya keberhasilan atau tujuan yang telah direncanakan. Efektifitas pastinya selalu bersanding terhadap tujuan yang telah direncanakan dengan realitas tujuan yang diapatkan. Sudut pandang dan penilaian efektifitas dapat di indikasikan dengan berbagaicara. Menurut Arthur G. Gedain dan kawan-kawan, definisi dari efektifitas adalah: *“That is, the greather the extent it wich an organization’s goals are met or surpassed, the greather its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi, semakin besar efektifitas).<sup>43</sup> Efektifitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) prngaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Yang makna lainnya ialah untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan terhadap rencana yang sudah di tetapkan.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi efektifitas menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Hidayat (1986), dijabarkan bahwa efektifitas merupakan tolak ukur dari keberhasilan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai. Yang mana semakin tinggi tingkat keberhasilan, maka efektifitas yang dihasilkan semakin tinggi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nasution, *sosiologi pendidikan*, (Jakarta: Bumi aksara, 1983), hlm. 56

<sup>44</sup> Angrayni dan yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya TerhadapTingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) hlm.13

- b. Menurut Hasibuan Hadayaningrat (1996) bahwa efektifitas ialah tercapinya suatu tujuan eksplisit dan implisit.
- c. Menurut Winardi (2002) efektifitas adalah hasil yang diperoleh seseorang dalam melakukan aktivitas yang diukur dari hasil produksi dengan waktu yang diperlukan.
- d. Menurut Sumaryadi (2005) bahwa organisasi bisa disebut efektif jika organisasi tersebut dapat mencapai tujuan secara penuh dari apa yang telah direncanakan.

Dari pendapat para ahli yang telah dijelaskan diatas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas adalah tolak ukur dari seberapa tinggi pencapaian hasil dibandingkan dengan rencana awal yang telah ditetapkan. efektif ialah ukuran dari seberapa baik seseorang melakukan kegiatannya, sejauh mana seseorang mendapatkan hasil yang sesuai dari apa yang telah direncanakan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahawa jika suatu aktifitas yang dilakukan berjalan secara baik dan sesuai dengan yang telah diharapkan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Dengan mengukur efektifitas suatu program. Dapat menilai keberhasilan dari program tersebut dalam mencapai tujuannya.<sup>45</sup>

## 2. Ukuran Efektifitas.

Tolak ukura dari efektifitas dapat dilihat dari seberapa maksimal tingkat hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Selain itu

---

<sup>45</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Knebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017) hlm. 74

efektifitas dapat diukur melalui seberapa tingkat yang telah dihasilkan dari kegiatan yang diadakan oleh organisasi, apabila tingkat keberhasilan dari kegiatan yang dihasilkan tinggi, maka dapat dikatakan efektif. Dalam efektifitas tidak disertakan seberapa banyak pengeluaran biaya untuk mencapai keberhasilan tersebut, tetapi di dalam efektifitas hanya memandang apakah program atau kegiatan yang sudah dibuat telah mencapai tingkat keberhasilan atau tujuan yang telah diharapkan.<sup>46</sup>

Berikut ini ialah penjabaran efektifitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

- a. Menurut Chambel J. P, (1989) ukuran efektifitas yang paling kompleks dan terlihat adalah:
  - 1) Keberhasilan suatu program.
  - 2) Keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan.
  - 3) Kepuasan terhadap program yang telah dibuat.
  - 4) Tingkatan *input* dengan *output*.
  - 5) Hasil yang dicapai secara menyeluruh.<sup>47</sup>
- b. Hidayat (1986), memaparkan bahwa efektifitas merupakan suatu tolak ukur dari seberapa besar target (komunitas, kualitas dan waktu) telah dicapai, yang mana semakin tinggi presentase target yang telah di dapatkan, maka dikatakan semakin efektif.

---

<sup>46</sup> Ulum dan Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press,2004), hlm. 294

<sup>47</sup> Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe dan Yusriati, *Penanggulangan Golput Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, (Medan: Lembaga penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018) hlm. 41

- c. Menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35), efektifitas adalah pencapaian target output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS) jika  $(OA) > (OS)$ , disebut efektif.
- d. Prasetyo Budi Saksono (1984), memaparkan bahwa efektifitas ialah seberapa tinggi tingkatan kelekatan output yang dicapai dengan output yang direncanakan dari sejumlah input.

Ditinjau dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator efektifitas adalah terwujudnya keberhasilan dalam mencapai sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah tolak ukur yang mana suatu tujuan telah tercapai dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, yang berarti definisi dari efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun akhir dari efektifitas adalah selalu sama, yaitu pencapaian tujuan.<sup>48</sup>

Ada juga barometer untuk mengukur efektifitas organisasi terdapat 3 pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) , pendekatan ini menggunakan input sebagai tolak ukur dari efektifitas. Di dalam pendekatan ini mementingkan tujuan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

---

<sup>48</sup> Lysa Anggrayni dan Yuliasti, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm.13-14

- b. Pendekatan proses (*process approach*) pendekatan ini digunakan sebagai acuan seberapa jauh efektifitas pelaksanaan rencana dari seluruh kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) pendekatan ini menggunakan *output* sebagai tolak ukur keberhasilan dari apa yang sudah direncanakan oleh organisasi tersebut.<sup>49</sup>

Sharma (1982:314) memaparkan kriteria efektifitas organisasi yang berhubungan dengan faktor internal dan faktor internal, yang meliputi:

- a. Produktivitas suatu organisasi atau *output*;
- b. Efektifitas beradaptasi suatu organisasi dari perubahan yang terjadi di dalam dan luar organisasi.
- c. Tidak adanya keterangan di dalam organisasi atau halangan – halangan masalah diantara bagian-bagian oganisasi.

Dari konsep Sharma tersebut, jelaslah bahwa produktifitas organisasi sebagai *output* menyangkut tiga elemen yaitu, kemampuan suatu organisasi dalam beradaptasi, bagaimanakah pengelolaan suatu organisasicdan bagaimanakah organisasi tersebut menangani masalah-masalah internal.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Raditya Arindya, *Efektifitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi* (Surabaya: Media Sahabat Cendaka, 2019), hlm. 67

<sup>50</sup> Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo 2005), hlm 140